
Studi Partai Politik Digital: Tinjauan Literatur Sistematis (SLR)

Lira Vira Anatasya

Jurusan Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
(Alamat: Jl. Tlogomas, no.264, Malang, Indonesia)

* Corresponding author: lira.anatasya13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan studi tentang Digital Political Party, metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah systematic literature review yang menggunakan 289 artikel ilmiah bersumber dari database scopus. Review artikel menggunakan aplikasi Vosviewer. Hasil penelitian mengungkapkan pemanfaatan ruang opini publik melalui media digital sudah banyak diandalkan oleh partai politik dalam melakukan politik marketing dan komunikasi politik, khususnya kampanye berbasis online. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan roadmap penelitian tentang perkembangan partai politik dalam memanfaatkan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya partai politik dalam memanfaatkan demokrasi virtual dalam meningkatkan kuantitas calon pemilih. Penelitian ini menyoroti pentingnya digitalisasi dalam politik modern dan implikasinya terhadap peran dan strategi partai politik. Dengan memahami konsep-konsep seperti demokrasi elektronik, aktivisme cyber, dan kampanye digital, partai politik dapat lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan politik mereka dan berinteraksi dengan pemilih dalam era digital ini. Keterbatasan penelitian ini adalah artikel yang digunakan hanya bersumber dari database scopus sehingga temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif tentang isu-isu digital political party seperti keterbatasan dalam cakupan geografis atau demografis, serta keterbatasan dalam metodologi penelitian. Penelitian berikutnya perlu menggunakan artikel ilmiah yang bersumber dari database internasional bereputasi lainnya, seperti Web of Science dan Dimensions Scholars.

Kata kunci: Digitalisasi, Demokrasi Elektronik, Aktivisme Cyber, Kampanye Digital

Pendahuluan

Media digital merupakan salah satu media komunikasi yang tengah diminati belakangan ini. Semakin banyak masyarakat dan organisasi menggunakan media digital sebagai alat untuk berkomunikasi, mendapatkan data, dan menyebarkan informasi. Sejumlah partai politik juga melihat penggunaan media digital sebagai cara untuk menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat. Karena banyaknya manfaat yang diperoleh dari penggunaan media digital, partai politik dapat melakukan inovasi baru (Trinh & Vu, 2023). Di era internet saat ini, menggunakan media sosial adalah salah satu

metode kampanye yang masuk akal dan gratis yang memiliki potensi untuk mempengaruhi secara signifikan pilihan pemilih. Di era kontemporer, kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi telah mengubah cara komunikasi politik dan kampanye politik dilakukan. Kemunculan media sosial adalah perkembangan yang signifikan dalam komunikasi politik karena media sosial telah berkembang menjadi platform yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kampanye politik (Datts & Schultze, 2022). Penggunaan media sosial dalam kampanye politik telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada Pemilu 2024 (Farazian & Paskarina, 2021).

Banyak penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa partai politik menggunakan media sosial sebagai alat kampanye. (Pérez-Castaños & Ruiloba-Núñez, 2023) mengungkapkan penggunaan media sosial ditemukan memainkan peran penting dalam membangun opini publik, khususnya dalam konteks pemilu. Sedangkan (Haßler et al., 2023) pernah meneliti bahwa pemanfaatan media sosial (medsos) sebagai alat kampanye merupakan suatu bentuk revolusi komunikasi di ranah politik Indonesia. Peran media sosial selama ini telah berhasil meningkatkan elektabilitas sejumlah partai politik (parpol). Dengan melihat bagaimana media sosial telah membentuk opini publik dan kampanye politik sebelumnya, penelitian ini dapat menambah landasan yang kuat untuk menggali lebih dalam tentang potensi penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik mengingat perkembangan yang cepat dari waktu ke waktu. Meskipun penelitian terdahulu telah banyak yang menjelaskan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik dan efeknya terhadap opini publik, tetapi masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya mungkin tidak mencakup semua aspek penting dari fenomena ini, dan kita perlu memperluas pengetahuan kita tentang bagaimana media sosial dapat membantu kampanye politik. Ini penting mengingat betapa pesat perkembangan teknologi dan media sosial dari waktu ke waktu.

Dengan menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR), penelitian ini memberikan update. Pendekatan ini melibatkan 289 artikel ilmiah yang dikumpulkan dari database Scopus, dan memungkinkan analisis menyeluruh dari berbagai aspek terkait penggunaan media sosial dalam kampanye politik, serta efeknya terhadap pembentukan opini publik dan elektabilitas partai politik. Dengan menggunakan metode SLR untuk memahami masalah riset yang didasarkan pada kumpulan penelitian terdahulu, keunggulan metode ini memberikan kerangka yang kokoh untuk membangun pemahaman baru tentang bagaimana media sosial telah memengaruhi dinamika politik kontemporer (Noorikhshan et al., 2023). Selain itu, penelitian ini menambahkan inovasi dengan menggunakan aplikasi Vosviewer untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan penelitian yang terkait. Ini memberikan gambaran yang lebih baik tentang kemajuan dan tren dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media sosial dalam kampanye politik. Memberikan dasar yang kuat untuk keputusan yang lebih baik di masa depan.

Penelitian ini menempatkan fokus yang jelas pada pertanyaan penelitian yang diajukan: "Bagaimana perkembangan penelitian terhadap digitalisasi partai politik?" Dengan menggunakan metode kualitatif analisis konten dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan menggunakan Vosviewer untuk menganalisis artikel,

penelitian ini. membuat kerangka kerja yang kuat untuk mengeksplorasi perkembangan penelitian yang ada di bidang ini. Pengembangan ilmu, khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan digitalisasi partai politik, adalah fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode SLR untuk memberikan pemahaman yang luas tentang penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran yang jelas tentang pola, tren, dan kecenderungan yang ditemukan dalam literatur saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk kemajuan lebih lanjut dalam bidang ini, baik dalam bidang akademis maupun praktis. Selain itu, penelitian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kebijakan partai politik di Indonesia yang berbasis digital. Penelitian ini, dengan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya, dapat memberikan wawasan yang berharga bagi partai politik dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih efisien untuk memanfaatkan media digital untuk mencapai tujuan politik mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi aktor politik dan pembuat kebijakan di Indonesia.

Dalam konteks digitalisasi partai politik, telah terjadi perubahan paradigma dalam praktik politik yang tradisional. Kemunculan e-democracy, cyberactivism, digital campaigning telah memberikan peluang baru bagi partai politik untuk berinteraksi secara langsung dengan pemilih melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi seluler (Torcal et al., 2023). Meskipun digitalisasi telah membawa manfaat besar bagi partai politik, seperti meningkatnya keterlibatan pemilih dan efisiensi kampanye, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti disinformasi, interferensi asing, dan ketidakstabilan politik selain itu tantangan lainnya seperti fragmentasi diskursus politik dan potensi untuk mengganggu sistem akuntabilitas pemilihan umum yang ada (Ricky, 2022). Dengan memanfaatkan internet dan media sosial, partai politik dapat meluncurkan kampanye online, petisi digital, dan aksi politik lainnya untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hal ini memperkuat kampanye konvensional dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas komunikasi dengan pemilih (Pérez-Castaños & Ruiloba-Núñez, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan untuk memahami dampak lebih lanjut dari digitalisasi partai politik terhadap dinamika politik modern dan untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh era digital ini (Gold & Peña, 2021).

Demokrasi elektronik, atau "e-democracy", mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Partai politik dapat berinteraksi langsung dengan pemilih melalui platform digital seperti aplikasi seluler, media sosial, dan situs web, yang memungkinkan diskusi yang lebih terbuka dan transparan antara pemilih dan wakil politik mereka (Villaplana et al., 2023). Dengan digitalisasi partai politik sebagai salah satu komponen terpentingnya, e-demokrasi merupakan transformasi besar dalam perspektif politik kontemporer. Dalam era modern ini, partai politik yang dapat menggunakan dan menerapkan teknologi dengan baik telah memperoleh keunggulan yang signifikan (Kefford et al., 2022). Penting bagi pemerintah, partai politik, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka kerja yang mempromosikan e-demokrasi yang inklusif, aman, dan transparan dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang terkait dengan digitalisasi partai politik.

Hanya dengan cara ini kita dapat memanfaatkan potensi penuh teknologi untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik yang berkelanjutan dan bermakna (Laouni, 2022).

Selain itu, digitalisasi partai politik menjadi relevan dengan istilah "cyberactivism" atau aktivisme cyber (Zakaria, 2023). Dalam politik, cyberactivism merujuk pada upaya individu atau kelompok untuk menggunakan teknologi digital, terutama internet dan media sosial, sebagai sarana untuk menyebarkan pesan politik, membentuk gerakan politik, dan memobilisasi massa secara online (Chatterjee, 2023). Dalam konteks partai politik, cyberactivism dapat melibatkan kampanye online, petisi digital, dan aksi politik lainnya yang didukung oleh teknologi digital untuk mencapai tujuan politik tertentu. Cyberactivism telah berkembang menjadi komponen penting dari perspektif politik kontemporer, terutama dalam hal digitalisasi partai politik. Digitalisasi partai politik telah membuka peluang baru untuk mendapatkan dukungan pemilih dan melibatkan mereka melalui platform online. Dengan internet dan media sosial, individu dan kelompok dapat dengan mudah menyuarakan pandangan politik mereka, mengatur kampanye, dan memobilisasi massa (Arabaghatta Basavaraj, 2022).

Dalam era digitalisasi partai politik, cyberactivism merupakan fenomena penting. Ini memungkinkan partai politik berinteraksi secara langsung dengan pemilih mereka dan memobilisasi dukungan, serta memperluas ruang politik untuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa cyberactivism akan terus menjadi kekuatan positif yang mendukung demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan (Darius, 2022). Dalam digitalisasi partai politik, ide-ide seperti "digital campaigning" atau kampanye digital juga harus dipertimbangkan. Kampanye digital mencakup berbagai cara yang digunakan oleh partai politik untuk mempromosikan platform politik mereka, mendapatkan dukungan pemilih, dan mempengaruhi opini publik melalui media digital. Strategi-strategi ini termasuk penggunaan iklan online, konten video, targeting pemilih berdasarkan data, dan interaksi langsung dengan pemilih melalui platform media sosial (Barrett, 2022). Dengan munculnya media digital dan platform media sosial, kecepatan inovasi dan adopsi teknologi dalam kampanye telah meningkat drastis. Pada saat yang sama, lingkungan kampanye dan aturan-aturannya terus mengalir, karena logika platform, operasi partai, dan penyesuaian pemilih baik mencerminkan dan menciptakan ketidakstabilan dalam banyak sistem politik (Losada-Díaz et al., 2021). Selain itu, disinformasi, campur tangan asing dalam kampanye, ekologi media hiper-partisan, dan pengguna hiperaktif telah menciptakan perubahan dalam iklim opini. Secara keseluruhan, kampanye digital telah menjadi bagian penting dari strategi politik kontemporer. Partai politik dapat memanfaatkan teknologi digital secara efektif untuk meningkatkan keterlibatan politik, memperluas jangkauan kampanye, dan mengoptimalkan hasil pemilu (Koc-Michalska et al., 2023).

Seiring dengan kemajuan dalam komunikasi dan teknologi informasi. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah lanskap politik, memengaruhi kampanye, interaksi partai politik, dan opini publik. Penggunaan media digital telah menjadi inovasi penting bagi partai politik, memungkinkan mereka untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah (Trinh & Vu, 2023). Digitalisasi telah menyebabkan revolusi komunikasi politik di Indonesia, dengan partai politik menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk berinteraksi dengan

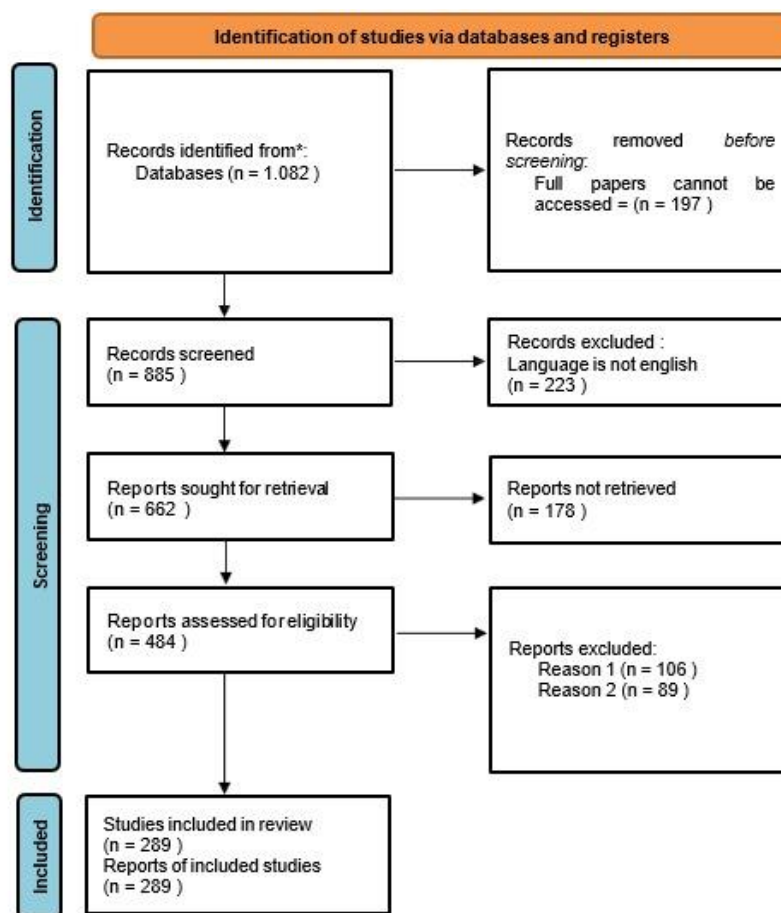
pemilih dan memperkuat mereka (Wurst et al., 2023). Digitalisasi partai politik telah berkembang pesat, terutama selama periode pemilihan umum yang telah berlangsung saat ini. Oleh karena itu, literatur ini menunjukkan bagaimana digitalisasi telah menjadi komponen yang sangat penting dalam strategi dan taktik partai politik, dan bagaimana hal ini telah membentuk dinamika politik kontemporer (Farazian & Paskarina, 2021). Diketahui secara luas telah mengubah praktik politik, kampanye yang didorong oleh data sering berpendapat adalah kekuatan gangguan demokratis yang signifikan karena berkontribusi pada fragmentasi diskursus politik, merusak sistem akuntabilitas pemilu yang ada dan menghancurkan pemilu 'bebas' dan 'tidak adil' (Kefford et al., 2022). Digitalisasi dalam kehidupan manusia telah mempengaruhi banyak aspek politik dalam dua dekade terakhir. Pengambilan keputusan antar partai adalah salah satunya. Sementara partai politik baru tampaknya menjadi organisasi digital asli, partai-partai yang sudah mapan semakin mulai mengintegrasikan alat online ke dalam proses internal mereka. Namun, tidak banyak diketahui tentang bagaimana selektor dalam partai mengevaluasi digitalisasi proses pengambilan keputusan penting (Laouni, 2022).

Menurut (Bloquet et al., 2022) Revolusi digital telah secara drastis mengubah sistem konvensional representasi politik, partisipasi dan komunikasi, dengan demikian membawa banyak perubahan budaya di bidang publik di mana tindakan kolektif dibangun dan aspek identitas baru dibangun. Kemunculan Revolusi Informasi menantang para ahli etika dan pembuat kebijakan untuk menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh integrasi masyarakat kebijakan teknologi. Sebagai raksasa teknologi yang beroperasi di bawah ideologi pemerintahan yang berbeda, konsekuensi kebijakan digital China dan penggunaan alat pengawasan tunduk pada pemeriksaan yang besar (Kirk et al., 2022). Aktivis muda dalam gerakan ini menggunakan internet sebagai alat untuk mengatur, mengorganisir dan memobilisasi pendukung di seluruh negara untuk mengambil jalan-jalan untuk menuntut demokratisasi lembaga-lembaga politik, mengangkat selubung pada partai-partai politik yang tidak berfungsi dan secara serius tidak menyentuh, lebih banyak kebebasan berekspresi, lebih batas pada kekuasaan kerajaan dan mengakhiri korupsi, nepotisme dan favoritisme (Laouni, 2022).

Penggunaan e-democracy, cyberactivism, dan digital campaigning dalam partai politik, menyoroti bahwa partai politik dapat meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat melalui interaksi langsung dengan pemilih melalui platform digital (Oross & Tap, 2023). Temuan ini menunjukkan kompleksitas dari perubahan politik yang dibawa oleh digitalisasi, yang menghadirkan tantangan baru bagi keberlangsungan demokrasi (Villaplana et al., 2023). Cyberactivism telah menjadi alat penting bagi partai politik untuk menyebarkan pesan politik dan memobilisasi massa secara online. Mereka menyoroti peran media sosial sebagai platform utama untuk aktivisme politik, dengan kampanye online dan petisi digital menjadi strategi yang umum digunakan oleh partai politik untuk mencapai tujuan politik mereka (Chatterjee, 2023). Digital campaigning juga menawarkan peluang untuk meningkatkan partisipasi demokratis dan keterlibatan politik. Platform online memungkinkan partai politik untuk melibatkan pemilih secara langsung dalam diskusi publik, forum, dan acara kampanye. Ini memperkuat hubungan antara pemilih dan partai politik, serta memperluas ruang politik untuk partisipasi masyarakat (Pfurtscheller, 2022).

METODE

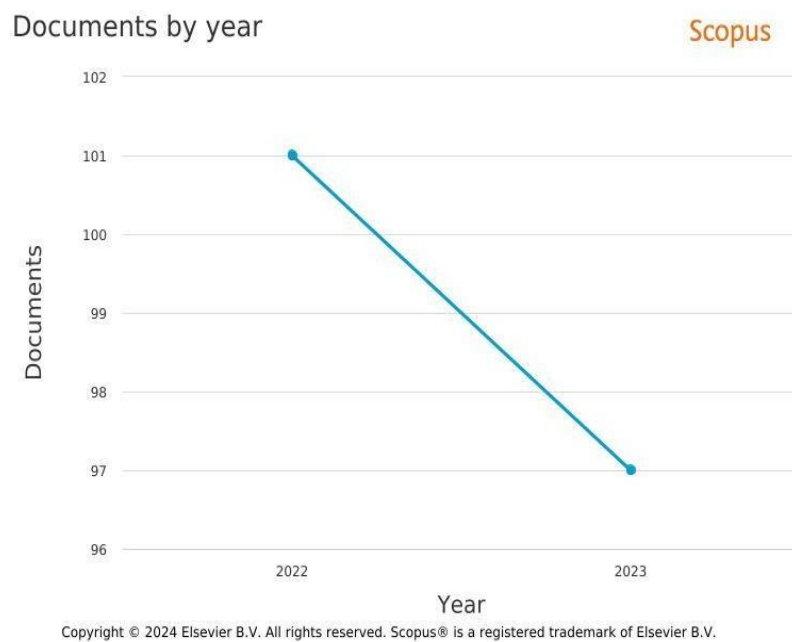
Systematic Literature Review (SLR) adalah metode penelitian sistematis yang mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan hasil dari berbagai studi penelitian tentang pertanyaan penelitian atau topik yang diminati. SLR bermanfaat bagi peneliti karena memberikan insentif yang jelas untuk penelitian baru, dan bagi praktisi karena menggunakan metodologi yang konsisten dan diterima secara luas. Penelitian ini menggunakan metode SLR untuk memetakan penelitian sebelumnya tentang digitalisasi political party yang berkembang di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang evolusi perkembangan digitalisasi political party. Penelitian ini juga menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses). Jurnal yang diperoleh berasal dari scopus, dengan mencari kata kunci digitalisasi political party. Metode PRISMA terdiri dari 4 langkah. Pertama, Pencarian data dilakukan melalui sumber data yang telah disediakan, dengan menggunakan kata kunci dan topik yang telah ditentukan untuk direview. Kedua, Skrining data yang bertujuan untuk menyaring data yang telah ditemukan agar sesuai dengan topik yang akan dibahas. Ketiga, Penilaian kualitas data, yang didasarkan pada teks lengkap serta kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Keempat, hasil pencarian data yang terpilih akan direview lebih lanjut untuk mencari persamaan dan perbedaan berdasarkan data yang telah ditemukan.



Skema pencarian jurnal artikel menggunakan diagram flowchart dan dengan menggunakan pedoman dari PRISMA, hal ini dilakukan untuk dapat memfilter jurnal yang akan direview (Sastypratiwi & Nyoto, 2020). Metode yang digunakan dalam memilih jurnal disesuaikan dengan panduan PRISMA dan menggunakan kata kunci untuk pencarian. Berdasarkan metode PRISMA yang telah dilakukan, pada bagian identification dapat diperoleh hasil yakni dari total 1.082 jurnal artikel dan prosiding yang diidentifikasi, 197 diantaranya dikeluarkan karena terjadi data tidak bisa diakses.

Pada bagian screening, jumlah jurnal yang sudah discreening sebanyak 885, lalu dikeluarkan sebanyak 223 karena jurnal artikel atau prosiding tidak menggunakan Bahasa Inggris, sehingga tersisa 662 untuk jurnal yang akan diambil dan dikeluarkan sebanyak 178 untuk jurnal yang tidak diambil dan jumlah akhir pada bagian ini sebanyak 484 dan dikeluarkan sebanyak 106 dengan alasan tidak sesuai data sebanyak 89 dan tidak sesuai teori, Sehingga pada bagian Included hanya 289 jurnal artikel yang digunakan dalam studi literature. Berdasarkan penilaian kualitas yang telah dilakukan, dengan hasil 289 jurnal dan/atau prosiding telah memenuhi pencapaian minimal tersebut sehingga dapat digunakan sebagai sumber literature dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

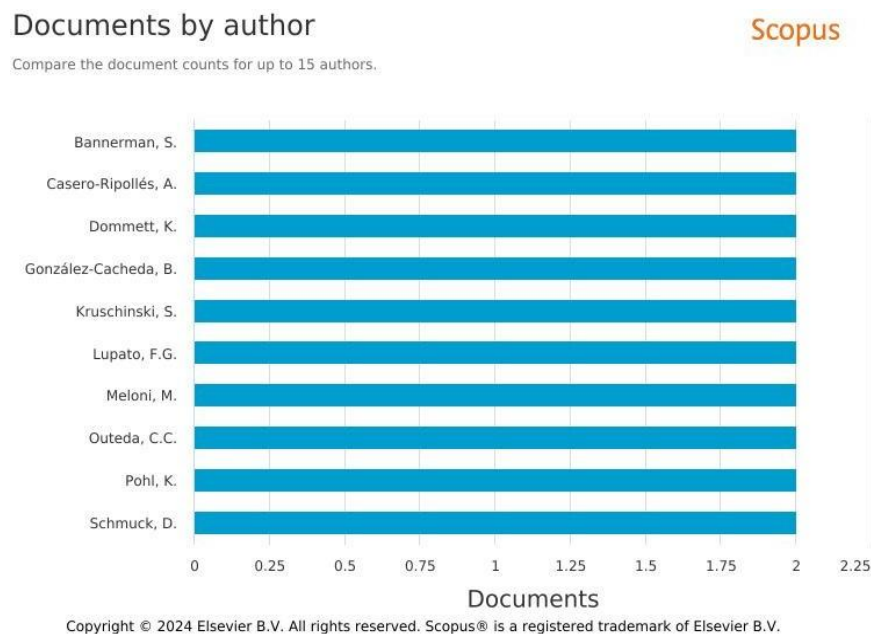


Gambar 1. Data Scopus by year

Berdasarkan data yang tercatat dalam sumber Scopus pada Gambar 1, tergambar sebuah tren penurunan dalam kajian mengenai topik digital political party dari 101 pada tahun 2022 menjadi 97 pada tahun 2023. Penurunan ini menyiratkan adanya perubahan dinamika yang signifikan dalam pemikiran dan fokus penelitian

dalam domain tersebut. Faktor eksternal seperti pergeseran kebijakan pemerintah atau situasi politik yang berkembang dapat menjadi penyebab utama di balik penurunan minat dan prioritas penelitian di bidang ini. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi arah dan fokus studi yang dilakukan oleh para peneliti, yang mungkin harus menyesuaikan agenda penelitian mereka sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di luar domain akademis.

Penurunan jumlah kajian dalam topik digital political party dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan bahwa fenomena tersebut telah kehilangan sebagian dari ketertarikannya dalam ranah penelitian akademis. Perubahan-perubahan eksternal yang berdampak pada minat penelitian ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara faktor-faktor politik, kebijakan, dan mungkin juga teknologi. Para peneliti yang tertarik dalam domain ini kemungkinan besar akan dihadapkan pada tugas untuk memperbarui dan menyesuaikan kerangka kerja penelitian mereka agar tetap relevan dengan perkembangan terkini. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk terus memantau dan menganalisis tren-tren dalam penelitian, serta memahami konteks eksternal yang dapat mempengaruhi dinamika bidang penelitian tertentu.

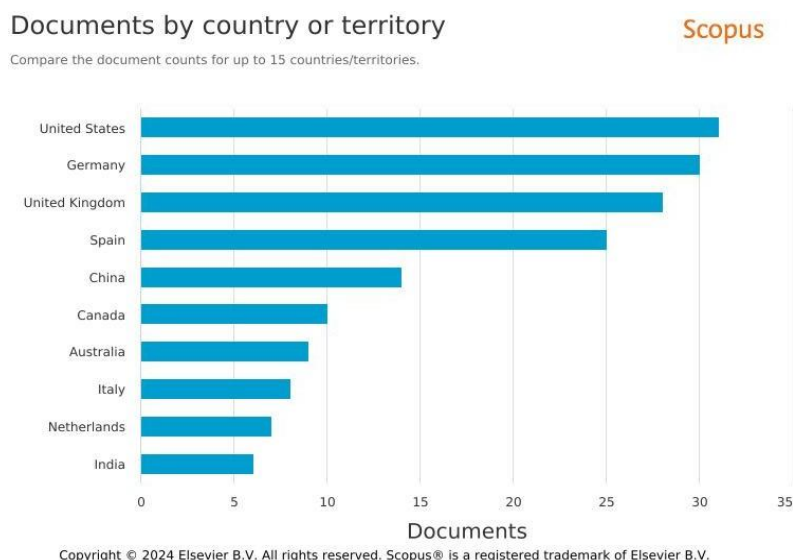


Gambar 2. Data Scopus by author

Berdasarkan data yang disajikan dalam Gambar 2 yang berasal dari Scopus, hasil analisis menyoroti bahwa beberapa penulis telah secara aktif mempublikasikan artikel-artikel yang mengulas perkembangan penelitian terkait partai politik digital. Dalam konteks ini, terdapat peneliti-peneliti seperti Bannerman, S, Casero-Ripolles, A, Dommett, K, dan sejumlah lainnya yang terlibat dalam penyusunan artikel-artikel tersebut. Gambar 2 secara khusus menyoroti bahwa sejumlah penulis ini telah berhasil menghasilkan dua publikasi atau lebih yang mencakup tema perkembangan partai politik digital. Observasi ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang signifikan dari sejumlah peneliti dalam menggali lebih dalam topik yang relevan dengan perkembangan politik modern, khususnya dalam era digital saat ini. Melalui

publikasi-publikasi mereka, penulis-penulis ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang dinamika dan implikasi dari fenomena partai politik digital.

Selain itu, gambaran yang diungkapkan dalam Gambar 2 menegaskan bahwa minat akademis terhadap penelitian tentang partai politik digital memiliki bobot yang signifikan dalam komunitas ilmiah. Penemuan bahwa beberapa penulis telah menulis lebih dari satu artikel menyoroti tingkat fokus dan dedikasi mereka terhadap topik ini. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan politik digital telah menjadi subjek yang menarik perhatian sejumlah peneliti terkemuka dalam bidangnya. Keberadaan sejumlah penulis yang secara aktif terlibat dalam menyusun artikel-artikel ini juga mengindikasikan bahwa partai politik digital menjadi topik yang semakin relevan dan mendalam dalam penelitian ilmiah. Dengan demikian, hasil analisis yang tergambar dari Gambar 2 memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya topik ini dalam diskursus akademis serta upaya bersama untuk memahami implikasi dan dinamika dari partai politik dalam era digital yang terus berkembang.

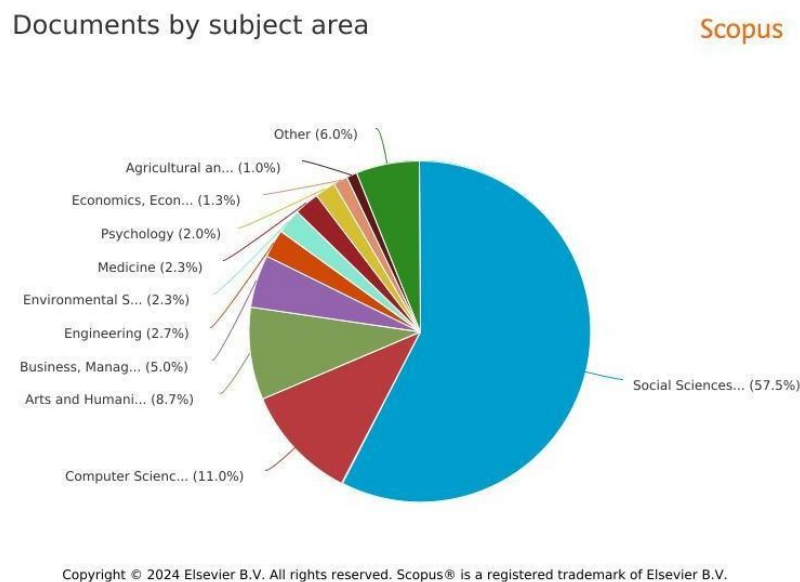


Gambar 3. Data Scopus by country

Amerika Serikat menjadi negara yang mendominasi dalam publikasi artikel mengenai perkembangan penelitian terkait layanan publik digital. Dengan jumlah mencapai 31 artikel, Amerika Serikat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan mengungkapkan pengetahuan tentang konsep ini. Sementara itu, negara-negara lain seperti Jerman, Britania Raya, dan Spanyol juga menunjukkan partisipasi yang signifikan dalam hal ini, dengan masing-masing menerbitkan 30, 28, dan 25 artikel. Hasil ini mencerminkan minat yang luas dari berbagai negara dalam memahami serta memperluas gagasan tentang pelayanan publik yang berbasis digital. Selain itu, data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang distribusi geografis dari penelitian ini, yang akan menjadi landasan penting bagi kerja

sama lintas negara dalam mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam pengembangan layanan publik yang modern dan efisien.

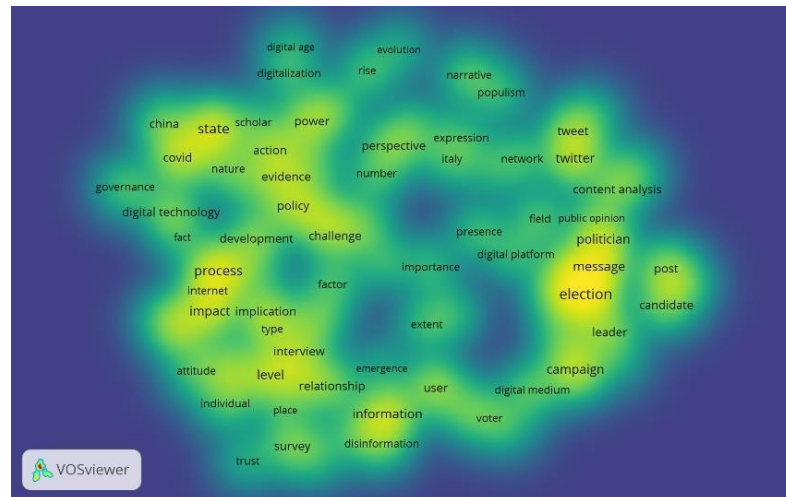
Namun demikian, penting untuk diakui bahwa tabel yang diberikan dalam gambar tersebut hanya mencakup sebagian dari keseluruhan kontribusi global dalam penelitian ini. Masih ada negara-negara lain yang tidak tercantum dalam tabel namun turut berkontribusi dalam pengembangan dan publikasi pengetahuan mengenai layanan publik digital. Hal ini menunjukkan bahwa topik ini tidak hanya menjadi fokus dalam ranah akademis di negara-negara yang terdaftar, tetapi juga menyebar secara luas di seluruh dunia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang dinamika global dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan layanan publik. Melalui kolaborasi internasional yang lebih besar, kita dapat mempercepat kemajuan dalam memperbaiki layanan publik dan menjawab tantangan-tantangan yang kompleks dalam era digital ini.



Gambar 4. Data Scopus by Subject area

Data yang tercatat dalam Gambar 4 yang berasal dari Scopus menunjukkan hasil penelitian tentang artikel digital political party dengan fokus pada beberapa subjek yang relevan. Menariknya, hasil tersebut menggambarkan sejumlah subjek yang terlibat dalam konteks politik digital. Dari data yang terungkap, subjek ilmu sosial mendominasi dengan 57,5%, menandakan tingginya minat dalam memahami interaksi antara politik dan teknologi digital. Diikuti oleh ilmu komputer dengan 11,0%, yang menunjukkan peran teknologi informasi dalam membentuk dan memengaruhi dinamika partai politik. Selanjutnya, subjek seni dan humaniora muncul dengan 8,7%, memberikan perspektif budaya dan sosial dalam konteks politik digital yang semakin berkembang. Tak hanya itu, masih banyak subjek lainnya yang turut

kompleksitas dan keragaman dari pendekatan yang dapat diambil dalam memahami fenomena digital political party, serta pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dalam penelitian tersebut. Dengan memahami kluster-kluster ini, para peneliti dapat mengembangkan strategi penelitian yang lebih terarah dan komprehensif dalam memahami perkembangan digital political party secara menyeluruh.



Gambar 6. Visualisasi Densitas Digital Public Service

Gambar 6 menampilkan visualisasi densitas yang merujuk pada penelitian digital political party di seluruh dunia. Visualisasi ini memperjelas kepadatan istilah berdasarkan intensitas warna yang digunakan. Konsep densitas ini dapat berperan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana suatu topik penelitian telah dieksplorasi. Jika suatu istilah ditampilkan dengan warna yang samar atau redup, hal itu menandakan bahwa penelitian tentang istilah tersebut masih jarang dilakukan. Sebaliknya, jika warnanya semakin cerah dan intens, seperti yang terlihat pada istilah-istilah seperti election, process, dan internet dalam Gambar 6, hal itu mengindikasikan bahwa topik tersebut telah banyak diteliti. Namun, istilah-istilah seperti network, presence, dan flied muncul dengan warna yang hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa penelitian mengenai topik-topik ini masih jarang.

Analisis lebih lanjut terhadap visualisasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tren penelitian dalam bidang digital political party. Misalnya, melalui pemahaman bahwa istilah-istilah yang berwarna cerah sudah banyak diteliti, peneliti dapat memperluas cakupan penelitian mereka ke area yang masih minim penelitiannya. Dengan demikian, visualisasi densitas seperti yang tergambar dalam Gambar 6 tidak hanya memberikan gambaran umum tentang distribusi penelitian, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih terperinci untuk membantu peneliti dalam menentukan arah penelitian mereka berikutnya. Ini mencerminkan betapa pentingnya analisis data visual dalam memandu pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam konteks penelitian ilmiah.

Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat banyak topik yang membahas digital political party. Topik pembahasan mengenai istilah election, process, dan internet sudah banyak dilakukan dalam penelitian digital political party di berbagai dunia. Untuk

kedepannya topik pembahasan mengenai digital political party dapat dilakukan pada topik yang jarang diteliti seperti istilah network, presence, flied . Dengan menggunakan topik tersebut dapat dilakukan penelitian yang paling terbaru mengenai digital political party diberbagai dunia.

Hasil penelitian yang disajikan dalam paparan tersebut menyoroti perkembangan dan tren terkait digitalisasi partai politik serta dampaknya terhadap dinamika politik modern. Hasil analisis yang disajikan menunjukkan sebuah fenomena menarik dalam tren penelitian tentang digital political party dari tahun 2022 hingga 2023, dimana terdapat penurunan signifikan dalam jumlah kajian yang dilakukan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi dinamika penelitian, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau situasi politik yang berubah, yang secara langsung berimplikasi pada minat para peneliti dalam mengeksplorasi topik ini lebih lanjut. Temuan ini konsisten dengan penemuan sebelumnya yang menegaskan bahwa digitalisasi partai politik adalah sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama faktor-faktor politik dan kebijakan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sebagai ilustrasi, perubahan dalam regulasi terkait media sosial atau pergeseran dalam prioritas politik mungkin menjadi pendorong utama dari penurunan minat penelitian terhadap digital political party. Misalnya, jika terjadi perubahan dalam kebijakan media sosial yang membatasi atau mengatur penggunaan platform-platform digital untuk kepentingan politik, hal tersebut dapat mengurangi minat para peneliti untuk mendalami topik tersebut lebih lanjut. Begitu juga, jika terdapat pergeseran dalam agenda politik yang memprioritaskan isu-isu tertentu, minat penelitian terhadap digital political party mungkin akan terpolarisasi menuju topik-topik yang lebih relevan dengan situasi politik yang berkembang. Dengan demikian, penurunan dalam jumlah kajian tentang digital political party dari tahun 2022 hingga 2023 tidak hanya merupakan hasil dari dinamika internal dalam bidang penelitian tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang mencerminkan perubahan dalam konteks politik dan kebijakan yang lebih luas.

Analisis mendalam tentang kontribusi penulis dan negara dalam penelitian mengenai digital political party mengungkapkan beragam aspek yang signifikan. Temuan ini mencakup penemuan bahwa sejumlah penulis telah secara aktif mempublikasikan artikel- artikel yang jumlahnya sebanding, mencerminkan tingkat minat dan kontribusi yang seimbang dalam memperluas wawasan terkait topik tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran penting negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, yang secara konsisten menjadi kontributor utama dalam publikasi ilmiah yang berkaitan dengan partai politik digital. Dalam konteks ini, hal ini menegaskan bahwa digital political party tidak hanya menjadi fokus di tingkat nasional, tetapi juga memperlihatkan dampak dan relevansi global yang signifikan dalam dinamika politik kontemporer. Dengan demikian, analisis tersebut tidak hanya menggambarkan keragaman penulis yang terlibat, tetapi juga mencerminkan pentingnya kerjasama lintas negara dalam mengembangkan pemahaman kita tentang fenomena politik yang semakin terdigitalisasi ini.

Hasil analisis subjek penelitian menyoroti dominasi subjek ilmu sosial sebagai fokus utama, mencerminkan kekompleksan serta sifat multidisipliner dari fenomena digitalisasi yang mempengaruhi partai politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang menekankan peran krusial ilmu sosial dalam menangkap dinamika politik modern yang semakin terdampak oleh teknologi digital. Lebih jauh lagi, variasi topik yang dicakup dalam penelitian, seperti strategi e-democracy, cyberactivism, dan digital campaigning menggambarkan secara jelas kompleksitas serta dampak yang merata dari digitalisasi dalam ranah politik.

Visualisasi menggunakan aplikasi Vosviewer memberikan gambaran yang lebih baik tentang pola, tren, dan hubungan antar istilah dalam penelitian digital political party. Identifikasi kluster istilah menunjukkan bahwa penelitian terhadap digital political party dapat dipisahkan menjadi beberapa kluster yang saling terkait, menyoroti keragaman pendekatan dan topik penelitian dalam domain tersebut. Analisis densitas juga mengungkapkan bahwa beberapa topik, seperti pemilihan, proses, dan internet, telah menjadi fokus utama penelitian, sementara topik lain mungkin memerlukan lebih banyak perhatian di masa depan.

Di tengah arus digitalisasi yang melanda hampir setiap aspek kehidupan, politik tidak terkecuali. Fenomena digitalisasi partai politik menjadi bagian integral dari transformasi politik modern. Melalui media sosial dan teknologi digital lainnya, partai politik dapat mengubah cara mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan pemilih, dan membentuk opini publik. Namun, dampak dari digitalisasi ini tidak hanya sekadar perubahan teknologi; hal ini juga mengubah lanskap politik secara keseluruhan (Roziqin et al., 2021). Pertama-tama, perubahan dinamika politik modern tercermin dalam penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik yang semakin dominan. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada iklan di media tradisional, tetapi meluas ke ranah digital, memanfaatkan platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan demikian, partai politik dapat mencapai pemilih dengan lebih langsung, menyebarkan pesan politik mereka, dan memobilisasi dukungan secara efektif (Al & Barru, 2019).

Namun, di balik potensi positifnya, digital partai politik juga menimbulkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, interferensi asing, dan fragmentasi diskursus politik menjadi beberapa dari tantangan tersebut. Fenomena ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan responsif dari para pemangku kepentingan politik, termasuk praktisi politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Selain itu, digitalisasi partai politik juga menunjukkan relevansi yang baik, baik secara global maupun lokal. Fenomena ini terjadi di banyak negara dan memiliki dampak yang serupa di berbagai konteks politik. Oleh karena itu, penelitian tentang digital political party tidak hanya memberikan pemahaman tentang manfaatnya, tetapi juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi (Odeyemi et al., 2022).

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian digital political party juga menjadi kunci untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh. Digitalisasi partai politik melibatkan berbagai aspek, seperti komunikasi politik, teknologi informasi, dan ilmu politik (Brkan, 2022). Oleh karena itu, penelitian tentang digital political party memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melintasi batas-batas disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini (Behr, 2022). Dengan demikian, melalui penelitian dan pembahasan yang mendalam tentang digital political party, kita dapat memahami perubahan politik modern dan memandu pengembangan kebijakan politik yang tepat di era digital ini. Dengan demikian,

digitalisasi partai politik bukanlah sekadar tentang teknologi, tetapi juga tentang transformasi lebih dalam dalam cara kita memahami dan terlibat dalam politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tren penelitian mengenai *digital political party* mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 hingga 2023, kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan yang berubah. Meskipun demikian, keterlibatan aktif para penulis utama menunjukkan bahwa isu politik digital tetap relevan dan penting dalam kajian ilmiah. Penelitian ini juga memperlihatkan distribusi geografis yang luas serta dominasi ilmu sosial, diikuti ilmu komputer dan humaniora, yang menegaskan sifat interdisipliner studi ini. Selain itu, kontribusi yang seimbang antarpengarang dan peran beberapa negara menyoroti pentingnya kolaborasi global dalam memahami digitalisasi partai politik. Adapun keterbatasan seperti cakupan geografis dan data historis menjadi dasar rekomendasi untuk memperluas dan memperdalam analisis di masa mendatang agar dapat memperkaya wawasan dan mendukung kebijakan politik di era digital.

REFERENSI

- Al, S., & Barro, G. (2019). Perlunya Revitalisasi Politik Demokratis melalui Musyawarah Dalam Konteks Budaya: Catatan tentang Pembangunan Partisipatif di Indonesia Nurlia. In *Meraja Journal* (Vol. 2, Issue 3).
- Arabaghatta Basavaraj, K. (2022). Digital campaigning in Karnataka. *South Asian History and Culture*, 13(3), 361–378. <https://doi.org/10.1080/19472498.2022.2058172>
- Barrett, B. (2022). Commercial Companies in Party Networks: Digital Advertising Firms in US Elections from 2006-2016. *Political Communication*, 39(2), 147–165. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1978021>
- Behr, A. (2022). Music, Digitalization, and Democratic Elections: The Changing Soundtrack of Electoral Politics in the UK. *Popular Music and Society*, 45(1), 31–47. <https://doi.org/10.1080/03007766.2021.1984020>
- Bloquet, C., Borucki, I., & Höhne, B. (2022). Digitalization in Candidate Selection. Support and Resistance Within Established Political Parties in Germany. *Frontiers in Political Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.815513>
- Brkan, M. (2022). The regulation of data-driven political campaigns in the EU: from data protection to specialized regulation. *Yearbook of European Law*, 41, 348–373. <https://doi.org/10.1093/yel/yeac006>
- Chatterjee, A. (2023). Majoritarianism and digital rights: understanding Kashmir and the ‘Othering of Other’ in the context of India. *Visual Studies*, 38(5), 869–879. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2021.1951122>
- Darius, P. (2022). Who polarizes Twitter? Ideological polarization, partisan groups and strategic networked campaigning on Twitter during the 2017 and 2021 German Federal elections “Bundestagswahlen.” *Social Network Analysis and Mining*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/s13278-022-00958-w>
- Datts, M., & Schultze, M. (2022). Social media and politics on the local level. *Policy and Internet*, 14(2), 468–484. <https://doi.org/10.1002/poi3.294>
- Farazian, T. A., & Paskarina, C. (2021). Political marketing in the 2019 local election: A case of the Indonesia solidarity party in the legislative election in Jakarta. *Academic*

- Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(5), 1–11. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0119>
- Gold, T., & Peña, A. M. (2021). The Rise of the Contentious Right: Digitally Intermediated Linkage Strategies in Argentina and Brazil. *Latin American Politics and Society*, 63(3), 93–118. <https://doi.org/10.1017/lap.2021.23>
- Haßler, J., Kümpel, A. S., & Keller, J. (2023). Instagram and political campaigning in the 2017 German federal election. A quantitative content analysis of German top politicians' and parliamentary parties' posts. *Information Communication and Society*, 26(3), 530–550. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1954974>
- Kefford, G., Dommett, K., Baldwin-Philippi, J., Bannerman, S., Dobber, T., Kruschinski, S., Kruikemeier, S., & Rzepecki, E. (2022). Data-driven campaigning and democratic disruption: Evidence from six advanced democracies. *Party Politics*. <https://doi.org/10.1177/13540688221084039>
- Kirk, H. R., Lee, K., & Micallef, C. (2022). The Nuances of Confucianism in Technology Policy: an Inquiry into the Interaction Between Cultural and Political Systems in Chinese Digital Ethics. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 35(2), 129–152. <https://doi.org/10.1007/s10767-020-09370-8>
- Koc-Michalska, K., Klinger, U., Bennett, L., & Römmele, A. (2023). (Digital) Campaigning in Dissonant Public Spheres. *Political Communication*, 40(3), 255–262. <https://doi.org/10.1080/10584609.2023.2173872>
- Laouni, N.-E. (2022). Cyberactivism and protest movements: the February 20th movement—the forming of a new generation in Morocco. *Journal of North African Studies*, 27(2), 296–325. <https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1810024>
- Losada-Díaz, J.-C., Zamora-Medina, R., & Martínez-Martínez, H. (2021). Hate speech on Instagram during 2019 General Election in Spain. *Revista Mediterranea de Comunicacion*, 12(2), 195–208. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM.19142>
- Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>
- Odeyemi, T. I., Igwebueze, G. U., Abati, O. O., & Ogundotun, A. O. (2022). Political hibernation in-between elections? Exploring the online communication and mobilisation capacities of Nigeria's political parties. *Journal of Public Affairs*, 22(S1). <https://doi.org/10.1002/pa.2804>
- Oross, D., & Tap, P. (2023). Moving online: political parties and the internal use of digital tools in Hungary. *European Societies*, 25(2), 346–370. <https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1943485>
- Pérez-Castaños, S., & Ruiloba-Núñez, J. M. (2023). Once More, with Feeling! Digital Campaigns and Emotional Candidacies in X in Andalusia and Castilla y León. *Social Sciences*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/socsci12090504>
- Pfurtscheller, D. (2022). From private phones to public screens: Cross-media recontextualization of chat discourse in the case of the Austrian ÖVP corruption affair. *Frontiers in Communication*, 7. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.1059131>
- Ricky, R. (2022). Pengembangan studi tentang pemilu dan digitalisasi secara global dan tantangannya di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Musamus Journal of Public*

- Administration*, 4(2), 132–139. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4123>
- Roziqin, A., Mas'udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian government policies against COVID-19. *Public Administration and Policy*, 24(1), 92–107. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039>
- Sastypratiwi, H., & Nyoto, R. D. (2020). Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 6(2), 250. <https://doi.org/10.26418/jp.v6i2.40914>
- Torcal, M., Carty, E., Comellas, J. M., Bosch, O. J., Thomson, Z., & Serani, D. (2023). The dynamics of political and affective polarisation: Datasets for Spain, Portugal, Italy, Argentina, and Chile (2019-2022). *Data in Brief*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109219>
- Trinh, M. H., & Vu, T. A. (2023). Nationalism in discursive legitimation: An analysis of the Vietnamese Communist Party's 'bamboo diplomacy' discourse on digital journalism. *Discourse and Society*. <https://doi.org/10.1177/09579265231217063>
- Villaplana, F. R., Megías, A., & Sandri, G. (2023). From open government to open parties in Europe. A framework for analysis. *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1095241>
- Wurst, A.-K., Pohl, K., Hassler, J., & Jackson, D. (2023). Emojis in Parties' Online Communication During the 2019 European Election Campaign: Toward a Typology of Political Emoji Use. *International Journal of Communication*, 17, 4686–4706.
- Zakaria, D. (2023). Praktik Kewargaan Digital Sebagai Edukasi Publik: Kajian Aktivisme Digital Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(6), 631–644. <https://doi.org/10.25139/jkp.v6i6.5293>